

## BAB II

### SEJARAH KEBANGKITAN NASIONALISME MESIR

#### A. Latar Belakang Nasionalisme Mesir<sup>1</sup>

Memudarnya pengaruh Kekhilafan Turki ‘Uthmānī (1294-1924 M)<sup>2</sup> di permulaan abad 20 berdampak pada eskalasi politik yang meningkat di provinsi-provinsi dari wilayah taklukan yang jauh dari pusat pemerintahan. Hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, disikapi beragam oleh pemerintahan lokal. Penguasa Mesir (Pasha) saat itu yakni Muḥammad ‘Ali mengambil kesempatan dari otonomi untuk melakukan sebuah lompatan kebudayaan; menerima modernisasi Barat. Sebuah keputusan besar yang kelak menjadi pondasi bagi gerakan Nasionalisme Mesir.<sup>3</sup>

Pasha Muḥammad ‘Ali memulai proyeknya dengan mengirim pemegang teknologi militer ke Italia dan Perancis di tahun 1839. Gelombang berikutnya disusul oleh para pemegang di bidang birokrasi dan teknologi manufaktur. Akibatnya muncul kelas baru di Mesir yakni golongan teknokrat alumni Barat. Ciri umum dari golongan ini yakni apriori terhadap nilai tradisi, cenderung kapitalistik dan permissif dengan apapun yang menjadi tren di Barat. Kemunculan golongan ini menimbulkan benturan kebudayaan di level akar rumput mengingat unsur tradisi Arab-Islam yang mengakar kuat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mesir (*Jumhurriyah Miṣr al-‘Arabiyah*, Republik Arab Mesir). Terletak di pantai timur laut Benua Afrika. Berbatasan dengan Laut Tengah (utara), Laut Merah (timur), Sudan (selatan) dan Libya (barat). Luas daerahnya 997.739 km persegi. Beribu kota di Kairo. Komoditas utamanya adalah pertanian dengan mengandalkan pengairan dari Sungai Nil, pariwisata, industri tekstil dan pupuk. Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jld III, 226

<sup>2</sup> Mesir berada dalam teritori ‘Uthmaniyah sejak tahun 1390 M. Mesir secara berturut-turut -setelah era Khilafah tunggal (Khalifah al-Rashidah, Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah)- mulai dikuasai oleh Dinasti Ibn Ṭūlūn (868-969 M), Faṭimiyah (969-1171 M), Ayyubī (1171-1250 M), Mamlūk (1250-1517 M) kemudian ‘Uthmaniyah (1517-1914). Ritter, *Islamic Egypt*, 3.

<sup>3</sup> Peretz, *The Middle East*, 203

<sup>4</sup> Ibid, 210

Situasi Mesir antara 1850-1914 sungguh pelik. Secara teritorial, Mesir adalah bagian dari Daulah ‘Uthmāniyyah Turki namun Mesir juga di bawah kolonialisme Inggris<sup>5</sup>. Periode tersebut juga akrab dengan krisis ekonomi yang berdampak terhadap minimnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan secara umum.<sup>6</sup> Instabilitas politik dan krisis ekonomi seringkali menjadi bahan bakar bagi tersulutnya perubahan radikal.

Generasi revolusioner lahir dari kalangan terpelajar terutama yang mengecap terbukanya sebuah era baru di Barat.<sup>7</sup> Dengan didorong teknologi informasi yang semakin maju menjadi media penyebaran ide-ide revolusi dengan kalangan muda dengan mengandalkan jurnalisme sebagai media utama penyebarannya. Gairah revolusi tidak mungkin dibendung, resistensi terhadap gerakan ini hanya punya kesempatan untuk melakukan pengendalian.

Revolusi yang digemakan adalah revolusi dimensi sosial terutama berkaitan dengan dua hal isu strategis yakni politik dan keagamaan. Mesir termasuk negara yang dapat melewati fase revolusi ini dengan damai meski ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Gejolak hanya terjadi di level elit, sementara masyarakat akar rumput cenderung sibuk dengan rutinitas harian dan lebih tenang berada dalam “payung” tradisi. Konflik terjadi dalam level yang tidak ekstrim meski eskalasinya begitu panas dan menarik banyak pihak untuk mencermati perkembangannya.

## B. Pilar Nasionalisme Mesir

Setiap ide dan gerakan pasti memiliki pondasi-pondasi ideologis. Pondasi-pondasi tersebut dapat digali kembali melalui kajian epistemologis. Mayoritas peneliti orientalis

---

<sup>5</sup> Inggris mulai mengintervensi Mesir sejak tahun 1882. Tahun 1914-1922, Mesir bahkan menjadi bagian dari protektorat (persemakmuran) Britania Raya. Dewan Redaksi, *Ensiklopedia*, 227

<sup>6</sup> Peretz, *The Middle East*, 211

<sup>7</sup> *Ibid*, 211

biasanya merujuk kepada konsep pondasi nasionalisme<sup>8</sup> Mesir yang dirumuskan oleh Ṭaha Ḥusayn.<sup>9</sup> Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat tiga pilar utama tegaknya Nasionalisme Mesir yakni:<sup>10</sup>

#### 1. Warisan Arab

Sulit untuk tidak mengatakan Mesir bukan Arab. Meski bagian kontinental dari Afrika, Mesir bahkan dapat dikatakan lebih Arab daripada beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Perjalanan sejarah bersama Arab (Islam) sejak penaklukannya oleh ‘Amr Ibn al-‘Āṣ di tahun 16 H (637 H)<sup>11</sup> hingga abad modern ini menjadi bukti konsistensi kultur Arab di Mesir.

Bahasa Arab adalah bahasa resmi Mesir menggantikan bahasa Romawi yang digunakan sejak 30 SM.<sup>12</sup> Nama yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah nama Arab. Bahasa sehari-hari yang digunakan selama ratusan tahun adalah Bahasa Arab. Membicarakan Mesir berarti membicarakan salah satu devian dari bangsa Arab sebagaimana kita membicarakan Saudi, Iraq, Kuwait atau Qatar.

Warisan sesungguhnya (*the real legacy*) dari bangsa Arab adalah Islam. Islam adalah pondasi bagi konsistensi kultur Arab di Mesir. Simbol-simbol Islam sangat mendominasi kehidupan rakyat Mesir. Simbol Islam tidak hanya tersirat dalam arsitektur

---

<sup>8</sup> Kata *nation* telah mengalami pergeseran dari wilayah genetikal menjadi wilayah geografis sehingga *nation* sekarang dipahami sebagai *country*. Nasionalisme adalah sebuah kewajiban moral (*moral duty*) untuk melakukan sesuatu demi kejayaan negara. Geer, *The Priesthood of Nationalism in Egypt*, 20

<sup>9</sup> Ṭaha Ḥusayn (1889-1973) merupakan seorang tokoh modern-liberal. Mengalami kebutaan sejak balita tidak melunturkan semangatnya untuk terus belajar. Berkenalan dengan alam pemikiran Barat di Universitas Cairo sejak tahun 1902, meraih gelar doktor dari Sorbonne University tahun 1918 dengan disertasi berjudul *The Philosophy of Ibn Khaldūn: Introduction and Criticism*.

Dikenal sebagai tokoh pioneer Sekulerisasi di Mesir. Idenya tentang sekulerisasi berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh pembaharu yang lain semisal murid ‘Abduh yang termasyhur yakni Rashid Riḍā. Meski kontroversial, ide sekulerisasi tersebut mendapatkan atensi yang cukup luas sampai ke Nusantara via Harun Nasution, Nurcholis Madjid dan Dawam Raharjo yang tentu saja tak luput dari kontroversi dan resistensi Ulama lokal. Lihat Barsihannor, *Pemikiran Ṭaha Ḥusayn*, (Jurnal al Hikmah Vol. XV Nomor 1/2014), 118-120.

<sup>10</sup> Ritter, *Islamic Egypt*,

<sup>11</sup> Romawi berkuasa sejak 30 SM setelah era Cleoptra hingga kemudian datang ‘Amr Ibn ‘Āṣ datang menghalau dominasi Romawi dari Mesir tahun 637 M. Sejak itu Mesir berada dalam kekuasaan Arab-Islam. lihat Ritter, *Islamic Egypt*, 5. Penaklukan tersebut terjadi di masa Khalifah ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb, lihat juga Jalaluddin al-Suyūfī, *Husn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa al-Qahirah*, (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1967), 121.

<sup>12</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedia*, 266

yang diejawantahkan oleh masjid-masjid dan makam-makam, bahkan simbol tersebut terapkan dalam dunia politik-kemasyarakatan. Universitas Al-Azhar<sup>13</sup> dapat dimasukkan sebagai bukti dominasi simbol tersebut. Islam tidak hanya warisan bangsa Arab, Islam telah menjadi identitas rakyat Mesir.

Nasionalisme (sebagaimana namanya yang diambil dari *nation* yang bermakna bangsa) tidak mungkin diwujudkan tanpa pengentalan terhadap identitas bangsa tersebut.<sup>14</sup> Identitas tersebut selain dapat berupa tradisi atau warisan turun-temurun, dapat juga berupa ide-ide atau nilai-nilai yang ditanamkan secara massif terhadap bangsa tersebut. Identitas tersebut sering dimunculkan melalui wacana “persamaan nasib”.<sup>15</sup>

Secara tradisi, “identitas kebangsaan” dalam istilah intelektual Muslim diistilahkan dengan *‘aşabiyah*. Tradisi *‘aşabiyah* dinilai negatif karena warisan dari karakter fanatik tribal yang nirperadaban. Penilaian negatif muncul karena Islam menghendaki sebuah komunitas persaudaraan yang tidak mengenal batasan identitas apapun.<sup>16</sup> Di sisi lain, *‘aşabiyah* juga punya nilai positif berupa integritas dan loyalitas.<sup>17</sup>

Islam di masa awal berhasil mengatasi faktor-faktor negatif *‘aşabiyah* sambil tetap memelihara karakter integritas dan loyalitas bangsa Arab yang diarahkan kepada perjuangan Islam. Identitas Arab tidak sepenuhnya hilang namun Islam menjadi faktor yang dominan. Islam berhasil menyatukan suku-suku Arab yang awalnya saling terlibat konflik dengan memberi mereka identitas baru yakni “Muslim”.<sup>18</sup> Tidak semua orang Arab menjadi muslim, namun identitas muslim pasca paripurna risalah telah menjelma menjadi sebuah identitas kebangsaan bagi Arab.

---

<sup>13</sup> Sejarah al-Azhār sebagai tonggak peradaban Mesir dimulai sejak tahun 359 H (980 M) dan terus eksis lebih dari seribu tahun sampai saat ini (1439 H). Al-Azhār didirikan pada tahun itu oleh Raja Keempat Dinasti Faṭimiyyah yakni al-Mu‘iz. Lihat Muhammad ‘Abd al-Mun‘im al-Khafajī, *al-Azhār fī Alfi ‘Am*, (Kairo: Maktabah Kulliyāt al-Azhār, 1988), 27

<sup>14</sup> Geer, *Nationalisme in Egypt*, 22

<sup>15</sup> Ibid, 22

<sup>16</sup> QS. Al-Ḥujurāt: 10-13.

<sup>17</sup> Abdurrahman Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Kairo: Dar Ibn al Ḥaytsam, 2005), hal 97.

<sup>18</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhīr wa al-A‘lām*, (Kairo: Dār al-Kutūb al-‘Arābī, tth), Juz III, 7-10

Muslim sebagai identitas kebangsaan ini kemudian dipertebal dengan terbentuknya pemerintahan teokrasi-oligarki Islam. Diawali oleh Abū Bakr al-Shidiq yang menjadi orang pertama yang bergelar *Amīr al Mu'minīn*.<sup>19</sup> Gelar ini secara maknawi mengarah kepada fungsi sosial keagamaan namun diperankan oleh para pemangkunya untuk menjalankan fungsi politik kenegaraan. Gelar tersebut kemudian digilir, diperebutkan bahkan diubah formulanya selama kurang lebih 13 abad.<sup>20</sup>

Setelah menikmati masa kejayaan selama 13 abad beserta catatan pasang-surutnya, abad XIV merupakan titik balik dari kejayaan tersebut. Meski demikian, identitas muslim sebagai sebuah identitas kebangsaan masih belum sepenuhnya pudar di tengah kegamangan negara-negara Islam menentukan arah pasca era kejayaan di abad VII-XI. Jamal al-Dīn al-Afghani<sup>21</sup> memanfaatkan sentimen identitas tersebut untuk mengkampanyekan ide Pan-Islamisme<sup>22</sup>.

Selain mewariskan sentimen agama sebagai identitas kebangsaan, Islam juga mewariskan *rule of life* baik dalam ranah personal maupun publik. Untuk ranah personal sangat bisa dipahami karena semua agama menggarap ladang yang sama. Masalah timbul ketika menyangkut aturan-aturan yang menyangkut ranah publik karena mengharuskan negara atau pemerintahan hadir dalam ranah tersebut. Tarik ulur peran politik dalam kebijakan publik yang Islami merupakan isu yang cukup menegangkan bahkan hingga saat ini, bahkan hingga di negara berpenduduk muslim yang jauh dari Arab.

Muncul asumsi bahwa Arab-Islam hanya sekedar proses mutual adaptatif diantara keduanya. Artinya, Arab dan Islam tidaklah identik satu sama lain. Langkah ekstrim

---

<sup>19</sup> Dihitung berdasarkan tahun kejatuhan Khilafah 'Uthmanī di tahun 1924.

<sup>20</sup> Sejak masa Abū Bakr al-Ṣiddīq hingga ke khilafahan terakhir di Turki 'Utsmani

<sup>21</sup> . Pada era belakangan muncul kritik tentang eksistensi al-Afghani dalam dunia pembaharuan Islam. Kritik tersebut datang dari gerakan pemurnian (puritan) yang dikenal dengan gerakan *Salafī*. Salah satu tokoh terbesar mereka yakni Syaikh Muqbil Ibn Hādī al-Wādī menyoroti asal-usul al-Afghani yang berasal dari Iran; negeri bercokolnya paham Shi'ah yang merupakan rival dari Sunnī. Banyak orang yang tertipu dengan *laqab* al-Afghani seakan-akan dia berasal dari Afghanistan. Al-Afghani adalah seorang provokator yang menebar kebencian terhadap pemerintahan Muslim, demikian vonis Syaikh Muqbil. Muqbil Ibn Hādī al-Wādī, *Qām al-Mu'ānid wa Zajr al-Hāqid al-Ḥasid* (Damaj: Dār al-Ḥadīth, 1993), 331.

<sup>22</sup> Weismann, *Muhammad 'Abduh*, 4-5

ditempuh Mustafa Kemal di Turki menerjemahkan asumsi ini dengan membangun negara sekuler. Hanya saja, meski tidak semua yang Arab itu selalu identik dengan Islam namun Arab adalah sungai bagi Islam untuk mengalir sehingga melepaskan Islam dari Arab seringkali dianggap tidak Islami.

Dalam konteks Mesir masa revolusi, penjagaan terhadap warisan Arab ini merupakan arus utama. Tantangannya adalah meski menjadi arus utama kelompok ini terbelah menjadi dua kelompok besar yakni kelompok tradisional-konservatif dan modern-transformatif. Kesamaan dari kedua kelompok ini adalah keduanya mengusung Islam sebagai sebuah warisan berharga bagi keberlangsungan umat.

## 2. Rasionalisme (Yunani)

Yunani adalah simbol bagi pendayagunaan kekuatan akal sebagai pilar bagi pendayagunaan manusia. Klaim ini tentu tidak nihil perdebatan, namun diakui atau tidak sumbangsih Yunani terhadap filsafat sebagai *mother of science* sangat besar. Filsafat Yunani kemudian bertemu dengan peradaban Islam di era kejayaan ekonomi Arab<sup>23</sup>, pengenalan tersebut melahirkan nama-nama besar seperti Ibnu Rushd dan Ibn Sinā.

Tidak sedikit cendekiawan muslim meyakini bahwa kejayaan peradaban Islam di interval abad IV – X H dibangun di atas pilar-pilar filsafat. Kemunduran yang terjadi di era setelahnya diyakini merupakan akibat umat lebih memilih hidup dalam asketisme dan pesimis terhadap potensi akal manusia. Filsafat diabaikan, fanatisme golongan ditumbuhsurburkan. Ṭaha Ḥusayn adalah tokoh lokomotif bagi gerbong pemikiran ini.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Diawali dengan penerjemahan karya-karya Yunani di pemerintahan al-Ma'mūn kemudian karya tersebut diadaptasi bahkan dikembangkan dengan format yang sangat berbeda dari warisan pemikiran Yunani oleh pemikir-pemikir Muslim. Lihat Syamsudin Arif dan Dinar Dewi Kania, *Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam* dalam Adian Husaini, et.al, *Filsafat Ilmu*, 23.

<sup>24</sup> Seorang sastrawan yang menjadi pelopor kritik teks-teks agama. Karya-karyanya diperhitungkan sebagai penggerak modernisasi pemikiran di Mesir.

Kritik terhadap pengusung Rasionalisme Yunani ini terlihat seperti langkah mundur yang terlalu jauh. Padahal peradaban Islam juga memiliki konsep Rasionalisme yang merupakan versi adaptasi dari para filosof Yunani dengan menambahkan nafas keIslaman. Pembuktian di ranah kajian pun menunjukkan bahwa elaborasi para intelektual modern di Mesir terhadap Rasionalisme Yunani dilakukan via peradaban baru yang sedang tumbuh di Barat pasca Revolusi Perancis dan Revolusi Industri.

Ide Rasionalisme ini mendapatkan penentangan yang kuat dari para ulama tradisional. Ide ini dianggap merupakan bagian dari upaya kolonialisme Barat untuk mempertahankan supremasinya terhadap negara-negara Islam. Sebagian lagi meyakini bahwa rasionalisme merupakan ancaman bagi eksistensi nilai-nilai agama (Islam) di tengah umat. Sebagian lagi dengan tegas menyatakan bahwa penggiat paham ini layak dijatuhi hukum kafir.<sup>25</sup>

Tujuan dari kampanye Rasionalisme sebagai salah satu pilar Revolusi Mesir adalah mencoba membuat kanal penyaring bagi budaya dan agama yang bercampur-baur. Para pengusung ide ini memandang bahwa masyarakat Mesir mengalami ketidakjernihan dalam cara pandang mereka terhadap agama. Ketidakjernihan ini timbul akibat banyak sekali instrumen-instrumen “buatan manusia” yang dipaksakan untuk dilabeli sebagai “buatan Tuhan”. Ketidakjernihan tersebut semakin mengeruh bersamaan dengan tumpulnya nalar kritis terhadap potensi Islam sebagai sebuah agama yang dapat menjadi pilar dari peradaban manusia, tidak hanya sekedar dogma dan liturgi.

Pada tataran realita, rasionalisme cukup disambut dengan baik oleh kalangan intelektual. Sambutan yang ditawarkan tidaklah sewarna. Setidaknya ada dua kutub rasionalisme yang ditawarkan yakni para pemikir sekuler dan reformis-Islamis. Pengusung sekulerisme seperti Ṭaha Ḥusayn mendakwahkan dekontruksi agama dari

---

<sup>25</sup> Tauseef Ahmad Parray, *Islamic Modernist and Reformist Thought: A Study of The Contribution of Sir Sayyid and Muhammad Iqbal*, World Journal of Islamic History and Civilization, Cet. I, Vol. II, 2011, 80-81

ruang publik terutama berkenaan dengan kebijakan hukum, politik dan isu-isu strategis kenegaraan.<sup>26</sup> Reformis-Islamis seperti ‘Abduh dan Rida’ menawarkan konsep yang lebih “ramah” terhadap agama terkait peranannya di ruang publik. Modernisme mengusulkan restrukturisasi terhadap budaya keagamaan tanpa harus menepikannya dari ruang publik bahkan menggunakan potensi-potensi umat beragama sebagai modal bagi pemberdayaan manusia (human empowering).<sup>27</sup>

Rasionalisme via modernisme ditawarkan melalui pengkajian ulang terhadap al-Quran, kitab-kitab hadis dan pelbagai pemahaman Islam lintas disiplin. Pengkajian ulang dilakukan untuk membangun resolusi antara warisan klasik sebagai landasan hukum (formatif maupun normatif) bagi umat Islam dengan penyelarasan terhadap kondisi faktual umat. Para ulama klasik telah berhasil menyelesaikan krisis faktual pada era mereka dengan cara mereka. Para modernis Islam meragukan cara yang sama akan efektif pada kondisi yang berbeda.<sup>28</sup>

Islam modernis tidak mengingkari kekayaan warisan ulama klasik. Penghargaan terhadap karya dan perjuangan mereka tetap mendapatkan tempat mulia bahkan di era modern. Islam modernis hanya berusaha menyelesaikan “keping puzzle terakhir” dari warisan tersebut yang sebenarnya sudah dipatri oleh ulama klasik tersebut namun karena perjalanan sejarah yang rumit mengakibatkan keping puzzle tersebut terlepas. Keping puzzle tersebut adalah penolakan sikap fanatisme ekstrim terhadap sebuah pemikiran.

Fanatisme sejatinya telah diserang oleh ulama *salaf* sejak di masa mereka.<sup>29</sup> Ulama *salaf* menjunjung tinggi semangat dinamisasi kajian agama. Dinamisasi agama dilakukan tidaklah bertujuan untuk membuat ajaran baru namun untuk sebagai sarana untuk

---

<sup>26</sup> Barsihannor, *Pemikiran*, 120

<sup>27</sup> Muhammad ‘Abduh, *al-Islām bayna al-‘Ilm wa al-Madaniyah* Mesir: Haiat al-Miṣriyah al-‘Ammah li al-Kitāb, tth, 23

<sup>28</sup> Ibid, 26

<sup>29</sup> Misalnya *qawl al-Imam al-Shafī* yang masyhur

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت



memfilter antara ajaran agama dengan pemikiran nisbi manusia, membuat garis tegas antara yang sakral dan profan. Karena itulah kritik sebagai bagian dari dinamisasi kajian agama bukan hal yang tabu bagi ulama *salaf* termasuk kepada guru mereka.

Bukti dari budaya kritik di era ulama *salaf* adalah munculnya madzhab-madzhab fiqh padahal pendiri madzhab tersebut punya hubungan guru-murid. Bukti paling nyata terjadi pada kajian hadits. Penerapan konsep Imam al-Safi'ī tentang hadis yang *maqbul* sebagai standarisasi kritik hadis membuat kajian hadis sangat dinamis, seorang murid atau ulama junior bisa membatalkan riwayat guru atau pendahulunya berbekal konsep tersebut. Suasana yang sama dapat dijumpai pula di ranah kajian yang lain.

Islam modernis sebenarnya memiliki visi yang sama dengan ulama *salaf* dalam menyikapi masalah sakral-profana. Perbedaan budaya kritik antara keduanya terletak pada metode kritik yang digunakan. Metode kritik ulama *salaf* bersifat tekstual sentris sedangkan para modernis mengusulkan kritik yang multi dimensi; kritik tekstual tidak ditinggalkan namun dikembangkan pula ranah kritik yang lain seperti kritik via empirisisme, kritik sosial dan kritik metodologi. Visi berikut dengan metode tersebut kemudian dibungkus dalam sebuah ide bernama Rasionalisme.

### 3. Kejayaan Masa Lampau

Mesir Kuno (Ancient Egypt) adalah legenda peradaban dunia. Peninggalan-peninggalannya merupakan “target buruan” paling menjanjikan bagi ilmuwan arkeolog bahkan pasar gelap barang antik memasang harga tertinggi bagi setiap kepingan peninggalan Mesir Kuno. Mesir Kuno juga sering dianggap bukti lompatan peradaban manusia. Manusia secara tiba-tiba menguasai sains yang kompleks dan bahkan tetap menjadi misteri di masa modern. Akibatnya berkembang isu bahwa peradaban Mesir Kuno diajarkan oleh makhluk luar angkasa (alien). Meski sebatas isu namun publik justru

merespon positif, banyak novel fiksi ilmiah dan film-film blockbuster Hollywood mengadaptasi isu itu menjadi pondasi cerita yang laris di pasaran.

Era Mesir Kuno berakhir di masa Cleopatra.<sup>30</sup> Kehebatan Legiun Romawi di masa itu sulit ditandingi bangsa manapun termasuk Mesir. Seketika itu peradaban Mesir runtuh oleh imperialisme. Romawi juga menyita banyak peninggalan Mesir Kuno; tidak hanya emas atau perhiasan, Obelisk yang merupakan simbol agama Mesir Kuno juga dipindahkan ke Romawi.

Tidak ada peradaban yang abadi. Seperti halnya Mesir yang berhasil ditaklukan, Romawi juga perlahan mulai memudar kedigdayaannya. Kemudian dari jazirah Arab yang tandus sedang terbit sebuah kekuatan baru bernama Islam. Konflik militer diantara keduanya menjadi tidak terhindarkan di Semenanjung Arab termasuk Mesir. Romawi yang mulai menua akhirnya dipukul mundur dari Semenanjung Arab. Mesir kemudian berganti penguasa.

Romawi tidaklah pergi dari Mesir tanpa bekas. Kristen merupakan sumbangsih terbesar mengingat memudarnya paganisme dari Mesir. Penganut Kristen di Mesir dikenal dengan Kristen Koptik (*al Qibṭī*). Meski mengambil agama dari Romawi, Mesir memilih “menyimpang” dari kepercayaan resmi Romawi. Orang Koptik lebih memilih Maria (Ibu Yesus) daripada Roh Kudus sebagai bagian dari Trinitas. Bila dicermati lebih lanjut, keimanan terhadap Tuhan Maria lebih dekat dengan kepercayaan Mesir Kuno (Ancient Egypt) yang menyembah kepada sebuah dinasti dewa Isis, Osiris dan Horus.<sup>31</sup>

Berada di bawah kekuasaan Islam, Mesir membangun kembali peradabannya. Konversi agama dari Kristen ke Islam mewarnai pergeseran peradaban. Peradaban Mesir di era Islam adalah peradaban keilmuwan dengan al-Azhar sebagai tonggak pondasinya.

---

<sup>30</sup> Ritter, *History of Egypt*, 1

<sup>31</sup> Isis adalah Tuhan Bapak, Dewa teragung yang memimpin dewa-dewa lain. Isis adalah putra dari Ra; Sang Pencipta. Osiris adalah istri dari Isis; seorang dewi yang menjadi perawan abadi. Horus adalah putra Isis-Osiris. Horus dilahirkan di 25 Desember. Lihat D.M. Murdock, *Christ in Egypt: The Horus-Jesus Connection*, (Seattle: Stellar House Publisher, 2009)

Selain itu, seni dan teknik arsitektur juga mengambil peranan meski tidak sespektakuler pendahulu mereka di masa kuno.

“Musim semi” peradaban Mesir tidak berjalan bagus. Konflik politik dan perebutan kekuasaan menghambat usaha bangsa Mesir untuk terus membangun kembali kejayaan mereka. Terakhir di bawah oligarki ‘Uthmanī, Mesir cenderung “berjalan tersuruk”. Keruntuhan Khilafah ‘Uthmanī turut menyeret Mesir ke titik nadirnya. Kemalangan Mesir ini kemudian menjadi pemicu bagi bangsa Mesir untuk melakukan sesuatu untuk negaranya. Sebagian intelektual kemudian mengkampanyekan unsur nostalgia tentang kejayaan Mesir di masa lalu.

Hanya saja, kampanye nostalgia tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap semangat revolusi. Ide nostalgia hanya efektif berkembang di kalangan pencinta sastra atau para budayawan.<sup>32</sup> Hal itu terjadi mengingat fleksibilitas bangsa Mesir dalam mengartikulasikan peradaban yang mereka bangun. Tidak seperti beberapa bangsa yang kesulitan mendekonstruksi peradaban lama mereka menjadi peradaban yang sama sekali baru. Mesir tidak mengalaminya.

Bangsa Mesir sangat lentur dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah mereka. Transisi dari paganisme Mesir Kuno kemudian menjadi pantulan dari peradaban Romawi berhasil dilewati dengan sukses. Meski menderita banyak kehilangan akibat imperialisme namun Mesir tidak sulit untuk mengubah dirinya. Hal sama terjadi pula tatkala Mesir berada dalam otoritas Muslim. Mungkin peradaban yang dibangun oleh generasi baru Mesir tidak sedahsyat pencapaian leluhur mereka dari generais kuno namun generasi baru Mesir selalu bisa memberi warna tersendiri dalam memberikan sumbangsih mereka terhadap dunia.

---

<sup>32</sup> Ritter, *History of Egypt*, 341

Fakta di lapangan juga membuktikan bahwa isu utama revolusi Mesir adalah pembaruan dalam pemikiran keagamaan. Islam tetap menjadi poros utama dari ide perubahan di Mesir. Hari ini kita melihat Mesir cenderung tidak banyak berubah secara fisik baik secara ekonomi dan domain-domain sosial lainnya, tetapi sumbangsih Mesir kepada dunia tidak bisa diremehkan terutama terhadap Islam. Mesir saat ini adalah pustaka keilmuan Islam terbesar di dunia. Segala hal tentang Islam dari berbagai sudut pandang bahkan aliran dapat diakses referensinya di Mesir. Sehingga meski tidak segemerlap Perancis, tidak sekuat Amerika Serikat, tidak secanggih Jerman atau Jepang; Mesir tetap memiliki tempat tersendiri di mata dunia yakni sebagai ladang riset yang menjanjikan terhadap studi kawasan Timur Tengah.

### C. Pengaruh Nasionalisme Mesir

Sejarah berkembangnya nasionalisme di dunia identik dengan sebuah perubahan besar di ranah sosial kemasyarakatan. Fenomena yang umum terjadi adalah pengentalan identitas kebangsaan yang tercermin dalam falsafah hidup. Berbicara tentang falsafah hidup, kesetaraan derajat merupakan ide yang paling sering disuarakan. Ide kesetaraan ini tidak berjalan sendiri karena biasanya dikaitkan dengan demokrasi sebagai bentuk pengejawantahan kesetaraan dalam ranah politik.

Nasionalisme juga menjadi corong bagi gerakan publik yang menyuarakan kemandirian bangsa yakni kebebasan sebuah bangsa menentukan nasibnya tanpa intervensi bangsa lain. Nasionalisme sering dihadapkan dan dibenturkan dengan kolonialisme dan imperialisme. Tidak sedikit yang menjadikan nasionalisme sebagai pilar kemerdekaan sebagaimana di Indonesia oleh Soekarno.<sup>33</sup>

Dalam konteks Nasionalisme Mesir, isu kesetaraan dan kemandirian bangsa sangat kuat disuarakan. Sisi uniknya dalam kasus Nasionalisme Mesir adalah munculnya gerakan kebangkitan Islam yang turut serta mengambil peran dalam gerakan Nasionalisme Mesir. Penganjurnya adalah para cendekiawan muslim seperti Abduh dan muridnya Ridha. Rincian tentang pengaruh nasionalisme dalam kehidupan berbangsa rakyat Mesir akan dibahas pada pembahasan berikut ini.

---

<sup>33</sup> Geer, *Nationalism in Egypt*, 57

## 1. Pengaruh Sosial Politik

### a. Nation State

Selama hampir satu abad (1800-1900 M), Mesir berada dalam kekusutan kekuasaan. Sulit disebutkan siapakah penguasa Mesir sebenarnya. Terdapat tiga oknum kekuatan yang memainkan peran kekuasaan di Mesir yaitu penguasa lokal (*khediv*), Khilafah Turki ‘Uthmani dan Inggris.<sup>34</sup> Kondisi politik yang tidak sehat ini tentu berdampak langsung pada kemajuan Mesir.

Gerakan Nasionalisme kemudian disuarakan oleh kalangan terpelajar. Mereka menuntut terbentuknya format negara yang jelas dengan kemandirian bangsa sebagai pondasinya. Pengaruh Inggris dianggap sebagai sebuah penjajahan, sementara Khilafah ‘Uthmaniyah dianggap tidak cukup kuat untuk menggerakkan pembangunan di Mesir. Nasionalisme Mesir menyuarakan terbentuknya Negara Bangsa (*Nation State*).

Nasionalisme dan *nation state* dapat diibaratkan seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masing-masing adalah alasan keberadaan sisi yang lain. Diawali dari sebuah kondisi kejiwaan yang mengarah kepada pengabdian kepada negara secara totalitas. Kondisi tersebut kemudian menemukan pijakan *episteme*-nya sehingga terbentuklah sebuah ideologi yang meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tujuan ideologi ini adalah terwujudnya sebuah negara bangsa.

Negara bangsa adalah suatu gagasan yang didirikan untuk seluruh bangsa berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang terlibat kesepakatan tersebut. Dengan kondisi dunia modern yang semakin terbuka terhadap latar belakang agama

---

<sup>34</sup> Wergall, *A History of Events in Egypt*, 44

dan ras, banyak yang berkeyakinan bahwa negara bangsa adalah solusi terbaik bentuk negara di abad modern.

Nasionalisme Mesir akhirnya berhasil digerakkan oleh golongan terpelajar. Perjuangan menyuarkan nasionalisme lebih sering disuarakan pada forum-forum diskusi dan kajian ilmiah. Ketegangan keamanan dapat diminimalisir sehingga revolusi berdarah dapat dihindarkan. Ide nasionalisme ini mengalami pasang-surut selama hampir 100 tahun lamanya sebelum akhirnya sampai pada puncaknya yakni deklarasi kemerdekaan Mesir pada tahun 1956 sebagai sebuah negara bangsa.<sup>35</sup>

#### b. Egalitarianisme

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, ada beberapa isu sensitif yang lazim terjadi dalam tradisi muslim klasik yakni isu hubungan muslim-kafir dan isu gender. Mengenai relasi muslim-kafir di masa lalu relatif tidak banyak persoalan tajam karena negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim telah teruji sebagai kelompok masyarakat yang paling toleran terhadap perbedaan agama.

Tantangan berbeda saat monarki dianggap terlalu uzur untuk bisa memacu negara-negara muslim dalam persaingan global. Tidak sedikit negara -termasuk Mesir- yang kemudian memilih mencoba sistem politik baru yakni demokrasi. Sehingga corak nasionalisme yang lahir di Mesir adalah nasionalisme demokratis berbeda dengan tetangganya yaitu Arab Saudi yang membingkai nasionalismenya tetap berada dalam jalur monarki-teokrasi.

Demokrasi mensyaratkan partisipasi publik secara total dalam politik. Akses politik harus terbuka bagi siapa saja. Egalitarianisme menjadi nafas bagi demokrasi. Sehingga membicarakan egalitarianisme pasti akan bersinggungan

---

<sup>35</sup> A. Goldsmith Jr. *Brief History of Egypt*, diakses dari <https://www.elibrary.bsu.az> pada tanggal 19 Agustus 2017.

dengan pembahasan demokrasi. Bukan rahasia lagi jika semua isme (paham) yang dikembangkan sejak era industri-modern selalu bermuara di politik.

Bangsa Mesir telah lama menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Islam mempunyai banyak peran termasuk diantaranya menjadi pertimbangan utama penerimaan khalayak terhadap sebuah ide yang diadaptasi dari pemikiran atau kebudayaan asing. Di sisi lain, Islam memiliki konsep kesetaraan yang banyak sisi di dalamnya menjanjikan ruang dialogis dengan konteks zaman. Ruang itu yang diincar oleh para penggiat egaliterianisme dalam berkampanye.

Egaliterianisme tidak benar-benar hidup dan berkembang di Mesir. Kekuatan kultur-primordial yang mengakar kuat menjadi tembok kokoh bagi penyebaran paham ini secara massif dan menjadi falsafah utama publik Mesir. Meski demikian, egaliterianisme tidak benar-benar ditolak dan diacuhkan. Kelahiran Republik Mesir menjadi bukti bahwa egaliterianisme memiliki posisi yang unik di Mesir. Hal ini justru menjadi faktor *genuine* dari gerakan Nasionalisme Mesir.

## 2. Pengaruh Pemikiran Keagamaan

Selama ratusan tahun sampai detik ini, Mesir identik dengan pusat pengajaran dan pembelajaran kajian-kajian Islam. Peran Mesir di masa klasik adalah menjadi arena berlaga bagi diskusi dan perdebatan berbagai madhhab dari berbagai disiplin kajian keagamaan. Fiqh, Tasawuf, dan Kalam merupakan penyumbang terbesar bagi perdebatan yang produktif tersebut.

Meski memiliki *brand* sebagai pusat kajian keagamaan yang dinamis, realitanya mayoritas masyarakat Mesir lebih nyaman dengan penyatuan pemikiran berdasarkan warisan pemikiran generasi sebelumnya. Budaya kritis tidak terlarang di Mesir namun tidak banyak yang antusias melakukannya. Sistem pengajaran agama



secara kultural dibangun berdasarkan kemampuan menghafal dan sedikit menepikan kemampuan memahami.<sup>36</sup> Hal ini menjadi gambaran umum dari mayoritas markas-markas pengkajian agama di daerah-daerah Mesir.

Diantara golongan minoritas yang antusias terhadap budaya kritis terhadap pemikiran keagamaan adalah al-Azhar. Sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit cendekiawan al-Azhar memiliki karakter yang kuat dalam meletakkan ilmu sebagai panglima terdepan pembangunan peradaban. Seorang alumni al-Azhar bisa saja menjadi seorang fanatis, namun kefanatikannya lahir dari proses pengkajian yang mendalam bukan dari sikap *taqlīd* buta.

Golongan berikutnya adalah para sarjana yang bersentuhan dengan filsafat Barat Modern. Ruh dari filsafat ini cenderung sekuler. Tentu saja term sekulerisme tersebut menimbulkan kegaduhan di Mesir mengingat kondisi sosio kultur Mesir yang terbiasa dengan prinsip religius baik dalam tataran formal-positif maupun dalam penghayatan nilai. Pemisahan keduanya dalam ruang yang berbeda dianggap sebuah penghianatan besar terhadap agama.

Bangsa Mesir adalah bangsa yang cinta ilmu dan menghargai kebenaran. Berlatar sikap cinta ilmu itulah, Islam berhasil didakwahkan di Mesir secara damai. Waktu yang lama dan keistiqomahan para penyebar Islam menjadikan agama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat Mesir.<sup>37</sup> Sikap fanatik yang bersarang di Mesir bukan lahir dari karakter asli Bangsa Mesir, sikap tersebut lahir akibat dari keterbatasan akses mayoritas muslim Mesir terhadap lautan hikmah ilmu. Ekonomi yang tersendat dan stabilitas politik yang tidak menentu menjadi alasan terkuat bagi keterbatasan akses tersebut bisa terjadi.

---

<sup>36</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet IX, 59

<sup>37</sup> Al-Suyufi, *al-Muhaḍarah*, 122.

Budaya fanatik dan jumud dalam beragama dapat ditemui dengan mudah di lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka juga apatis terhadap gagasan perubahan politik meski perubahan itu dapat menjadi jalan keluar dari keterbelakangan yang mereka alami. Agama menjadi tempat bersembunyi dari pembangunan peradaban yang lebih maju.<sup>38</sup>

Kondisi yang berbeda terjadi pada kalangan menengah ke atas. Masyarakat kelas elit lebih dinamis dalam menyikapi perkembangan zaman yang tak ayal berdampak pada terjadinya pergeseran budaya. Golongan elit inilah yang justru menjadi lokomotif perubahan di Mesir.

Akibat dari persinggungan budaya yang intens dengan Eropa via Perancis, gerakan perubahan ini bercorak Revolusi Perancis. Nasionalisme selain diejawantahkan sebagai ideologi identitas bangsa juga diidentifikasi sebagai gerakan partisipasi publik terhadap nasib bangsa itu. Ide *liberte, egalite and fraternite* turut digaungkan.<sup>39</sup>

Salah satu ciri khas dari gerakan Nasionalisme Mesir adalah tampilnya kalangan agamawan dalam kancah revolusi. Hal ini berbeda dengan revolusi di Eropa, saat agamawan justru menjadi “korban” revolusi<sup>40</sup>. Para cendekiawan muslim menyuarakan ide *tajdīd* dalam konteks perubahan sosial di Mesir. Bahkan mereka mendorong ide *tajdīd* juga terdengar gaungnya oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia.

---

<sup>38</sup> Geer, *Nationalism in Egypt*, 166

<sup>39</sup> Liberte bermakna kebebasan, *egalite* bermakna persamaan, *fraternite* bermakna persaudaraan

<sup>40</sup> Geer, *Nationalisme in Egypt*, 167